

MENGANGKAT PERAN PEREMPUAN PENGUSAHA DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

I Wayan Dipta*

Abstrak

Sektor swasta, terutama usaha kecil dan menengah (UKM) dinyatakan sebagai sektor yang berperan penting. Untuk itu kiranya perlu memperkuat peranan mereka dalam investasi. Karena UKM merupakan sektor yang dapat dimanage/dikelola oleh laki-laki maupun perempuan, maka artikel ini akan ditekankan pada peran UKM pada umumnya dan diutamakan pada perempuan pengusaha. Meskipun data tentang perempuan pengusaha sangat terbatas, tulisan ini akan mencoba memberikan beberapa pandangan tentang bagaimana mengembangkan wanita pengusaha dan peranan-peranan potensial yang akan menciptakan lapangan kerja. Diperkirakan bahwa sekitar Rp. 239.6 triliun dibutuhkan untuk diinvestasikan bagi UKM. Selain itu pula, bantuan pemerintah seharusnya tidak kurang dari pada Rp 26.36 triliun di tahun 2007. Bantuan pemerintah ditahun 2008 bisa ditingkatkan sehingga mencapai jumlah Rp. 30,33 triliun.

Karena tidak adanya informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan pengusaha, maka untuk memperkuat peranan perempuan pengusaha masih berdasarkan pada pertimbangan nilai. Di Taiwan, sebagian besar masalah perempuan pengusaha (55.2%) adalah pada akses finansial yang diikuti oleh akses pasar (15,9%). Oleh karena itu, menyediakan akses finansial dan akses pasar khususnya bagi perempuan pengusaha bisa menjadi program yang sangat penting bagi perkembangannya.

Selain itu, agar lebih fokus pada perkembangan UKM khususnya perempuan pengusaha, suatu kelompok sasaran harus dipilih yaitu diantaranya sektor pertanian, kehutanan, peternakan dan perikanan, perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri manufaktur dan sektor jasa. Sektor ini secara dominan dikontribusikan pada penciptaan lapangan kerja baru. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui program pengembangan klaster dan kemitraan dan restrukturisasi atau modernisasi usaha.

*Kata kunci : Penciptaan lapangan kerja berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi membutuhkan investasi.*

I. PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada Oktober 2005 lalu ternyata berdampak negatif terhadap semakin membengkaknya tingkat pengangguran. Meskipun ada kecenderungan penurunan, jumlah pengangguran masih tetap di atas 10,5 juta orang per Agustus 2006. Bahkan ada perkiraan bahwa setiap tahun ada tambahan sekitar 2 juta-2,5 juta angkatan kerja baru. Namun,

*) Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pemanfaatan Teknologi

tambahan penyerapan tenaga kerja setiap tahun dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini maksimal hanya 1 juta lapangan kerja yang berhasil diciptakan. Jadi ada selisih yang tidak bekerja sekitar 1-1,5 juta orang setiap tahun.

Untuk mengurangi masalah pengangguran ini, idealnya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui investasi dan ekspor. Upaya ini tampaknya belum berhasil terjadi selama tahun 2006 lalu. Pertumbuhan ekonomi ketika itu lebih banyak didorong oleh tingkat konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan yang tinggi melalui investasi dan ekspor, selain oleh usaha besar dapat juga dilakukan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Peran UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi telah terbukti nyata ketika Indonesia dilanda krisis moneter yang akhirnya berujung pada krisis multi dimensi. Ketika krisis terjadi pada pertengahan tahun 1997, banyak usaha besar yang selama ini tergantung pada pinjaman luar negeri dan bergulat menghadapi masalah hutangnya, UKM justru sebaliknya menikmati adanya defresiasi rupiah terhadap dollar. Banyak UKM, khususnya yang bergerak di sektor agrobisnis dan agro-industri, seperti usaha yang bergerak dalam ekspor kopi, lada, pala, cengkeh, udang, ikan dan produk perikanan lainnya, serta furnitur sangat menikmati adanya defresiasi rupiah tersebut.

Menyadari akan peran penting dan strategis UKM itulah, maka harus ada upaya yang lebih terarah dalam meningkatkan peran mereka dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menciptakan lapangan pekerjaan untuk berperan dalam mengatasi pengangguran, khususnya lagi bagi UKM yang dikelola oleh kaum perempuan. Bagaimana caranya dan apa saja yang mereka bisa lakukan, tulisan ini akan mencoba memaparkan upaya tersebut.

II. ANGKATAN KERJA DAN TINGKAT PENGANGGURAN

Pertambahan jumlah angkatan kerja yang selalu meningkat tiap tahun yang tidak sejalan dengan kemampuan dalam penyerapannya akan selalu menambah jumlah pengangguran di dalam negeri. Kompas, 14 Desember 2005 mempublikasikan prakiraan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terbuka. Pada Tabel 1 di bawah ini dapat dilihat bahwa angkatan kerja baru pada tahun 2007 diperkirakan sebanyak 2,05 juta orang. Sementara itu, prakiraan lapangan kerja baru yang bisa diserap sebanyak 2,92 juta. Namun, dari pengalaman pada tahun 2006, tampaknya lapangan kerja baru yang berhasil diciptakan tidak sesuai dengan prakiraan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5% pada tahun lalu ternyata tidak berhasil menciptakan pertambahan kesempatan kerja yang sesuai dengan harapan. Pada tahun 2006 bahkan tingkat pengangguran bertambah menjadi 10,93 juta orang atau 10,5% dari total angkatan kerja yang ada. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 ternyata kurang berkualitas, karena tidak banyak tenaga kerja yang berhasil diserap pada tahun 2006. Ini juga mengindikasikan, bahwa pertumbuhan ekonomi bukan karena peran sektor riil, tetapi mungkin karena investasi di sektor keuangan (pasar modal) dan juga karena konsumsi.

Perkembangan tentang prakiraan angkatan kerja baru, kesempatan kerja yang berhasil diciptakan dan tingkat pengangguran pada tahun 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terbuka

Thn	Angkt Kerja (Juta)	Angkt. Kerja Baru (Juta)	Pertumb. Ekonomi (%)	Jml Angkt Kerja Bekerja (Juta)	Lap Kerja Baru (Juta)	Lap Kerja Setiap 1% Pertumb Ekonomi	Pengangguran Terbuka	Prosentase Pengangguran Terbuka (%)
2004	103,97	1,34	5,13	93,72	0,91	178.000	10,25	9,86
2005	105,95	1,98	5,50	95,73	2,01	365.000	10,22	9,65
2006	107,96	2,01	6,08	98,32	2,59	426.000	9,64	8,93
2007	110,01	2,05	6,70	101,24	2,92	436.000	8,77	7,97
2008	112,01	2,09	7,20	104,57	3,33	463.000	7,53	6,72
2009	114,23	2,13	7,64	108,39	3,82	500.000	5,84	5,11

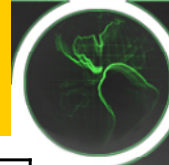
Sumber data : Kompas 14 Desember 2005

Bahkan kalau dibedah lagi secara mendalam, distribusi penyerapan tenaga kerja oleh masing-masing pelaku ekonomi dan secara sektoral, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Pada Tabel 2 tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2003, untuk Usaha Kecil, sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi yang paling besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 46,91%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 26,44%, jasa-jasa 10,99% dan industri pengolahan sebesar 9,29%. Sedangkan untuk Usaha Menengah, kontribusi penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 40,75%, disusul oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 17,97%, kemudian perdagangan, hotel dan restoran sebesar 17,50% dan jasa-jasa sebesar 11,38%.

Dari Tabel 2 ini dapat disampaikan, bahwa sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa-jasa merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2. Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Usaha Kecil, Menengah dan Besar Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2006 (Persen)



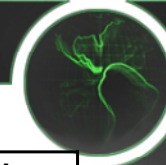
Sektor	UK	UM	UB	JML
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	46,91	17,97	1,27	43,71
2. Pertambangan & Penggalian	0,69	0,67	2,11	0,74
3. Industri Pengolahan	9,29	40,75	77,82	13,49
4. Listrik, Gas dan Air Minum	0,10	0,87	1,57	0,19
5. Bangunan	0,78	2,01	0,73	0,84
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	26,44	17,50	4,92	25,17
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,15	3,35	2,33	4,04
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,66	5,51	5,06	1,07
9. Jasa-Jasa	10,99	11,38	4,18	10,75
Jumlah	100	100	100	100

III. PERKEMBANGAN TENAGA KERJA DAN KEBUTUHAN INVESTASI UKM

Peranan UKM dalam penyerapan tenaga kerja tampaknya tidak perlu disangsikan lagi. Pada tahun 2006, diperkirakan tidak kurang dari 85,4 juta orang atau 96,7% jumlah tenaga kerja diserap oleh UKM, yaitu 80,9 juta orang oleh Usaha Kecil (UK) dan 4,5 juta orang oleh Usaha Menengah (UM). Pada tahun 2003 jumlah tenaga kerja yang diserap UK sebanyak 77,95 juta orang dan oleh UM sebanyak 3,99 juta orang, maka telah terjadi kenaikan rata-rata pertahun sebanyak 1,3% untuk UK dan 4,1% untuk UM.

Data di atas menunjukkan bahwa UKM memberikan kontribusi yang luar biasa dalam penyerapan tenaga kerja. Ini juga membuktikan bahwa UKM merupakan wahana yang ampuh dalam rangka mengatasi masalah pengangguran. Untuk dapat mendorong lebih besar lagi peran UKM dalam penyerapan tenaga kerja, maka investasi di UKM juga perlu terus ditingkatkan. Dalam kaitan ini, maka kebutuhan dan sumber investasi untuk UKM dapat diperkirakan sebagaimana Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Perkembangan dan Sumber Investasi Untuk Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2005-2009



Tahun	Kebutuhan Investasi			Sumber Investasi		
	UK	UM	UKM	Bank	Modal Sendiri	Pemerintah
2005	90,84	83,96	174,80	70,60	84,97	19,23
2006	105,78	98,71	204,49	71,57	110,43	22,49
2007	123,27	116,32	239,60	83,86	129,38	26,36
2008	140,99	134,72	275,71	96,50	148,88	30,33
2009	160,11	154,87	314,98	110,24	170,09	34,65

Catatan: Satuan dalam Rp. Trilyun;
 Asumsi bahwa ICOR UK = 2,66 dan UM = 5,17

Pada Tabel 3 di atas dapat diperkirakan bahwa kebutuhan investasi bagi UKM pada tahun 2007, kalau ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% adalah sebesar Rp.239,6 triyun. Idealnya, pemerintah harus mengalokasikan sebesar Rp.26,36 triyun anggarannya untuk investasi UKM tersebut. Bahkan, pada tahun 2008, pemerintah mestinnya harus mampu mengalokasikan anggarannya bagi pengembangan UKM sebesar Rp.30,33 triyun.

IV. BAGAIMANA MENDORONG INVESTASI

Mengharapkan investasi dari luar negeri kenyataannya belum menunjukkan hasil yang berarti selama tahun 2006 lalu. Para investor asing mungkin masih menunggu adanya perbaikan iklim investasi dan beberapa peraturan yang menyangkut aspek perburuhan. Kalau upaya terobosan lain tidak dilakukan, khawatir masalah pengangguran ini akan bertambah terus pada tahun-tahun mendatang.

Kalau kita cermati dari data dan fakta yang ada, upaya strategis lain yang sangat potensial untuk menyerap pengangguran adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ada beberapa fakta yang dapat dijadikan acuan akan posisi penting dan strategis UMKM dalam mengatasi masalah pengangguran. Hal ini dapat dilihat dari catatan Badan Pusat Statistik tahun 2005, bahwa setiap 1% kenaikan pertumbuhan ekonomi dari kontribusi UMKM akan mampu diserap sekitar 512 ribu angkatan kerja baru. Oleh karena itu, maka kita harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi oleh UMKM.

Bagaimana mendorong investasi di sektor UMKM dan pada sektor mana saja yang perlu mendapatkan perhatian. Dari data BPS tersebut terungkap bahwa beberapa sektor yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDB yang

memacu peningkatan pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertanian, khususnya sub-sektor agribisnis dan agroindustri, seperti minyak nilam, industri olahan dari produk kelapa, seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, VCO-*Virgin Coconut Oil*, dan berbagai produk kelapa lainnya. Beberapa produk perikanan dan kelautan juga sangat potensial untuk dikembangkan seperti udang, ikan kerapu dan rumput laut dan beberapa jenis budidaya perikanan dan kelautan lainnya. Sektor industri manufaktur dan kerajinan, khususnya untuk industri penunjang - *supporting industries* seperti komponen otomotif, elektronika, furnitur, garmen dan produk alas kaki juga memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja. Penulis juga mencermati banyak sekali produk-produk IT dan industri manufaktur yang sangat dibutuhkan, baik untuk pasar domestik, maupun untuk pasar ekspor. Di samping kedua sektor tersebut, sektor jasa keuangan, persewaan, jasa konsultasi bisnis dan jasa lainnya juga memiliki prospek baik untuk dikembangkan.

Ada beberapa program yang bisa dilakukan untuk mendorong investasi di sektor-sektor tersebut di atas, antara lain:

1. **Pengembangan Kemitraan;**

- (1) Kemitraan Sub-Kontrak untuk memproduksi komponen otomotif, elektronik dan furnitur. Kalau tahun 2007 di masing-masing sub-sektor dapat dikembangkan 100 perusahaan sub-kontraktor dengan karyawan rata-rata 10 orang dan rata-rata investasi sebesar Rp.100 juta sampai Rp.200 juta, maka akan terserap 3000 orang tenaga kerja dengan kebutuhan investasi sebesar Rp.30 milyar sampai dengan Rp.60 milyar.
- (2) Kemitraan Inti-Plasma untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri. Pengembangan pola Inti-Plasma ini cukup banyak bisa dikembangkan dan juga sangat relevan untuk melakukan industrialisasi di desa sebagaimana dicita-citakan oleh Bapak Presiden dalam disertasinya yang berhasil dipertahankan pada tahun 2004. Program ini juga sangat baik untuk menahan laju urbanisasi. Kalau di setiap Kabupaten pada tahun 2007 bisa dikembangkan 1 pola Inti-Plasma atau paling sedikit sekitar 200 unit Perusahaan Inti dengan jumlah karyawan rata-rata 20 orang dengan masing-masing 1000 Perusahaan Plasma yang mempekerjakan 5, maka pada tahun 2007 ini akan mampu diserap 1,04 juta orang tenaga kerja untuk program ini. Kalau masing-masing Plasma membutuhkan investasi Rp.10 juta sampai dengan Rp.20 juta, maka kebutuhan investasi UMKM melalui pola ini sebanyak Rp.2 trilyun sampai dengan Rp.4 trilyun.
- (3) Kemitraan Waralaba untuk pengembangan jasa keuangan seperti model Swamitra dan jasa lainnya seperti salon, hotel dan restoran dan bisnis retail. Pengembangan usaha melalui pola ini, khususnya jasa keuangan akan bermanfaat untuk mengatasi masalah permodalan bagi usaha mikro dan kecil. Program P3KUM dan PERKASSA selain model Swamitra perlu terus dikembangkan. Usaha salon dan restoran juga sangat potensial untuk dikembangkan dengan pola ini. Kalau masing-masing 200 unit usaha dikembangkan tahun 2007 dengan jumlah tenaga kerja masing-masing 10 orang, maka kedua jenis usaha ini sudah mampu menyerap sekitar 4000

orang. Adapun kebutuhan investasi bagi kedua usaha ini sekitar Rp.100 juta sampai dengan Rp.200 juta atau kebutuhan total investasi sebesar Rp.4 milyar sampai Rp.8 milyar.

2. **Restrukturisasi/modernisasi usaha** untuk meningkatkan produktivitasnya bagi perusahaan yang masih memiliki potensi untuk berkembang. Ada beberapa perusahaan kecil dan menengah yang perlu dilakukan restrukturisasi/modernisasi usaha, antara lain usaha garmen, kulit dan alas kaki yang permintaannya masih tinggi, namun terkendala bahan baku dan penolong serta teknologi baru.

Dengan pengembangan UMKM melalui kedua program di atas, diperkirakan tidak kurang dari 1 juta sampai 1,5 juta orang tenaga kerja akan diserap pada tahun 2007 ini. Penciptaan tenaga kerja seperti ini hanya sebagian kecil saja atau sebagai dampak dari program pemerintah. Kalau iklim investasi bisa diperbaiki pada tahun 2007 nanti, mestinya masalah tambahan 2 juta sampai 2,5 juta angkatan kerja baru mestinya akan mudah diserap pada tahun 2007.

V. PERAN PEREMPUAN PENGUSAHA

Perempuan pengusaha dibanyak negara telah menjadi perhatian besar dalam pembangunan bidang ekonomi. Di dalam forum APEC, pengembangan perempuan pengusaha juga telah menjadi isu yang hampir setiap tahun dibahas. Pembahasan perempuan pengusaha hampir dilakukan diberbagai fora yang ada, seperti Gender Focal Point (GFN), Women Leaders Network (WLN), Micro-Enterprises Sub-Group (MESG) dan Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG). Bahkan dalam forum APEC disepakati agar masing-masing ekonomi memberikan perhatian bagi perkembangan perempuan pengusaha, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong agar mengembangkan disagregasi data agar pembinaan dan pengembangan perempuan pengusaha yang adalah UMKM menjadi lebih terarah.

Indonesia sendiri yang menjadi anggota APEC belum banyak menindaklanjuti kesepakatan tersebut. Sampai saat ini, belum ada data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha yang juga adalah tergolong UMKM. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masih dilakukan secara minimal. Pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan UKM, selain mengembangkan proyek yang khusus untuk pengembangan gender, sejak tahun 2006 telah diupayakan penguatan koperasi yang khusus dikelola oleh kaum perempuan melalui program PERKASSA (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera). Dengan perkuatan masing-masing Rp.100 juta untuk setiap koperasi, pada tahun 2006 telah dibantu sebanyak 200 unit koperasi melalui pola konvensional (100 unit) dan pola syariah (100 unit) dengan nilai sebesar Rp. 20 milyar. Perkuatan ini diharapkan mampu mengembangkan perempuan pengusaha khususnya anggota koperasi.

Berkaitan dengan upaya peningkatkan peran perempuan pengusaha dalam pengangguran, maka disamping perlu adanya data yang jelas tentang jumlah perempuan pengusaha, kiranya juga harus dipahami masalah dan tantangan yang

dihadapi. Dengan peta yang jelas, maka akan dapat disusun program dan kegiatan yang terarah dalam pengembangan perempuan pengusaha ke depan. Namun demikian, mempelajari secara tersirat selama, ini kelompok perempuan pengusaha sepertinya banyak bergerak dalam usaha agrobisnis, khususnya sayur-mayur, pedagang jamu, kerajinan, serta warung makan. Untuk sektor industri, tampaknya belum banyak digeluti oleh perempuan. Walaupun demikian, diperkirakan kaum perempuan pengusaha ini cukup memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja dalam rangka mengatasi pengangguran, karena usaha yang mereka kembangkan memang merupakan usaha yang memberikan peran besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pengusaha, khususnya menyangkut masalah permodalan. Di Taiwan, diperkirakan 55,2% perempuan pengusaha memerlukan dukungan pendanaan dan 15,9% menyangkut akses pasar. Kalau informasi ini juga berlaku bagi perempuan pengusaha Indonesia, maka strategi pengembangannya haruslah memberikan perhatian pada akses pendanaan dan pasar. Oleh karena itu, upaya Kementerian Koperasi dan UKM melakukan perkuatan bagi koperasi yang dikelola perempuan untuk memberdayakan perempuan pengusaha sudahlah tepat.

VI. MODEL PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN USAHA

Upaya pengembangan usaha seperti di atas atau untuk menumbuhkan wirausaha baru tentu tidak akan berkembang kalau lingkungan bisnisnya kurang mendukung. Apalagi para pengusaha pemula biasanya memerlukan adanya ketersediaan modal awal yang bisa diakses untuk memulai bisnisnya. Modal awal ini merupakan pinjaman awal atau *start-up capital* yang bisa diperoleh para pengusaha yang baru memulai bisnisnya. Di negara lain, pinjaman awal ini biasanya disediakan oleh pemerintah melalui suatu lembaga keuangan tertentu. Di Jepang, misalnya ada lembaga **National Life Finance Corporation-NLFC** yang sudah berdiri sejak 1 Juni 1949. Lembaga inilah yang menyediakan pinjaman awal bagi pengusaha pemula dengan hanya menunjukkan rencana bisnis yang akan dikembangkan. Di Jepang, bisnis pemula yang biasanya dibiayai oleh NLFC ini adalah usaha yang berbasis IPTEK dan memperhatikan aspek kesehatan serta bisnis yang mau melakukan modernisasi. Dalam kaitan ini, setiap pelaku bisnis yang ingin mendapatkan pinjaman dari NLFC harus mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan dan Departemen Kesehatan setempat.

Di Indonesia sendiri, belum ada lembaga khusus yang memberikan pinjaman awal kepada para pengusaha baru. Pengusaha baru ini tidak mungkin dapat pinjaman dari perbankan. Karena perbankan selain mempersyaratkan agunan, biasanya usahanya harus sudah berjalan selama 2 tahun lebih. Oleh karena itu, kehadiran lembaga khusus yang menyediakan pinjaman awal bagi para pengusaha pemula ini haruslah ada. Selama ini peranan modal ventura atau *Venture Capital Company* belumlah optimal. Sering kita temui dan dengar perusahaan modal ventura melaksanakan bisnisnya seperti perbankan. Supaya tidak mendirikan lembaga baru, untuk mengatasi kebutuhan akan modal awal ini penulis melihat hal

ini bisa ditangani oleh **PT. Permodalan Nasional Madani (PNM)**. Untuk mendukung pembiayaan UMKM oleh PT. PNM ini, maka setiap anggaran perkuatan pemerintah dari berbagai instansi terkait yang diperuntukkan bagi pengembangan UMKM diberikan kepada PT. PNM. PT. PNM yang akan menyeleksi usaha yang layak untuk dibiayai yang diputuskan melalui rapat Komisi yang anggotanya dari berbagai instansi terkait. Pola pembiayaan bisa seluruh modal investasi atau 50% dari kebutuhan modal investasi. Para pengusaha yang dibantu tetap harus mengembalikan pinjamannya dengan tingkat bunga di bawah bunga pasar. Melalui pola ini, PT. PNM akan terus berkembang setiap tahun membantu mengembangkan bisnis UMKM.

Melalui program tersebut di atas, diperkirakan tidak lebih dari Rp.2,5 triliun sampai dengan Rp.5 triliun biaya investasi dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM. Kalau setiap tahun anggaran pemerintah secara keseluruhan berjumlah Rp.10 triliun untuk pengembangan UMKM, rasanya dana tersebut sudah jauh dari cukup untuk membangun UMKM yang sudah mampu menyerap 1 juta sampai 1,5 juta tenaga kerja baru. Kelebihan anggaran pemerintah di samping untuk pendampingan, juga untuk mengembangkan program pengembangan UMKM lainnya, seperti inkubator, kewirausahaan, sentra/klaster dan fasilitasi pengembangan pasar domestik/luar negeri.

Pengurangan pengangguran selain melalui program tersebut di atas dalam rangka penciptaan lapangan kerja, juga perlu dikembangkan sarana/prasarana pendukung seperti seperti jalan, jembatan, air bersih, pemasangan telepon dan listrik. Di samping itu adalah mengembangkan usaha yang sudah ada sehingga tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Berkembangnya suatu usaha akan meningkatkan kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk menjalankan usaha yang ditanganinya.

VII. PENUTUP

Masalah pengangguran merupakan hal yang harus segera ditangani. Keterlambatan menangani pengangguran akan menimbulkan masalah sosial baru yang semakin komplek ke depan. Mengatasi masalah pengangguran dapat dilakukan dengan pengembangan UMKM yang fokus pada beberapa sektor/komoditi tertentu dan dengan pendekatan yang terintegratif. Dalam kaitan ini, dua pilihan program pendekatan secara umum yang bisa dilakukan, yaitu Pola Kemitraan dan Restrukturisasi/Modernisasi Usaha.

Khusus untuk meningkatkan peran perempuan pengusaha, maka peningkatan akses finansial dan pasar merupakan suatu pilihan dalam pengembangannya. Adapun beberapa sektor yang potensial untuk dikembangkan adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor industri manufaktur dan sektor jasa-jasa.

Masalah krusial dalam pengembangan usaha baru adalah dukungan permodalan yang secara khusus bagi pengembangan UMKM. Supaya tidak membentuk lembaga keuangan baru, maka peranan PT. PNM dengan dukungan

APBN dari pemerintah dapat ditingkatkan fungsinya untuk memberikan layanan bagi para pengusaha baru tersebut. Kalau upaya ini dikembangkan dengan sungguh-sungguh, rasanya masalah pengangguran secara perlahan akan dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, (2006). *Pengukuran dan Analisis Ekonomi Kinerja Penyerapan Tenaga Kerja, Nilai Tambah UKM serta Peranannya Menurut Harga Konstan dan Berlaku Tahun 2006*. Kerjasama Badan Pusat Statistik dengan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian Koperasi dan UKM. Jakarta.

Anonim, (2007). *New Business Actualization Plan*. MOEA, Taipei.

Anonim, (2007). *National Life Finance Corporation*. Jepang.